



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAPORAN AKHIR

INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	: JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
JENIS KELUARAN (OUTPUT)	: DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD
TAHUN ANGGARAN	: APBDP 2025
PAGU ANGGARAN	: Rp. 350.665.136,-



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	2
2. Dasar Hukum..	3
3. Tujuan dan Sasaran.....	4
4. Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan	5
5. Pelaksana dan Penanggungjawab Sub Kegiatan	6
6. Jadwal Sub Kegiatan	7

BAB II URAIAN HASIL SUB KEGIATAN

1. Anggaran	9
2. Realisasi Anggaran.....	10
3. Hasil yang dicapai	11
4. Kendala yang dihadapi	11

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan	12
2. Saran	12

LAMPIRAN

1. Kerangka Acuan Kerja dan Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Surat Keputusan Panitia Pelaksana (SK)
3. Dokumen Pelaksana Anggaran Sub Kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip adalah rekaman atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip juga merupakan sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Mengingat hasil kegiatan administrasi dan manajemen terus tumbuh dan berkembang secara akumulasi serta semakin kompleknya fungsi dan tugas organisasi, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi dan bukti autentik suatu pengelolaan yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi instansi/organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk melakukan penyelamatan arsip, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan akuisisi arsip dari pemilik atau pencipta arsip seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi kemasyarakatan ataupun perorangan, penyelamatan ini sekaligus sebagai upaya untuk menyelamatkan bukti pelaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara yang akan menjadi memori kolektif daerah untuk generasi yang akan datang

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, telah dialokasikan dana untuk Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah



Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat membantu memperlancar dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3).
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55).



- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10).
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5).
- g. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).
- h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1017).
- i. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Nomor 10680).
- j. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11/KPTS-27/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- k. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12/KPTS-27/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

3. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan Sub Kegiatan
 - Tertatanya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



- Peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tugas teknis operasional dan tugas teknis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - Tercapainya kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Sasaran Sub Kegiatan
- Sasaran Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah Arsip Keuangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau

4. Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan

- a. Metode Pelaksanaan
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dilaksanakan dengan cara swakelola pengadaan langsung.
- b. Tahap Pelaksanaan
- Tahap perencanaan dan persiapan :
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja dan Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Membuat Jadwal Sub Kegiatan (Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan)
 - Melakukan Persiapan Penyelenggaraan Sub Kegiatan
 - Tahap Pelaksanaan :

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang sudah didata untuk melakukan Belanja Barang dan Pembayaran dari Belanja Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



- Tahap Pelaporan :

Semua pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah dilaksanakan akan dibuat Laporan Akhir Pertanggungjawaban yang akan dicetak dan digandakan setelah selesai pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

- c. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Lokasi Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dilaksanakan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

5. Pelaksana dan Penanggungjawab Sub Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD lainnya dibentuk organisasi pelaksanaan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran (PA) yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran APBDP pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau (setara eselon II) yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat setara Eselon III pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk membantu Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan APBDP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu pejabat setara Eselon IV pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal



pelaksanaan teknis kegiatan APBDP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

- d. Panitia Pelaksana Sub Kegiatan yaitu Panitia yang membantu pelaksanaan Sub Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

6. Jadwal Sub Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau direncanakan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.



1. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

TAHAP SUB KEGIATAN		TAHUN 2025																																																
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
Tahap Perencanaan & Persiapan																																																		
1	Penyusunan TOR/KAK																																																	
2	Pembuatan SK																																																	
3	Pembuatan Jadwal																																																	
Tahap Pelaksanaan																																																		
1	Pengumpulan Data																																																	
2	Pelaksanaan																																																	
Tahap Pelaporan																																																		
1	Penyusunan Laporan Akhir																																																	



BAB II

URAIAN HASIL SUB KEGIATAN

1. Anggaran

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ini dibebankan kepada APBDP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (DPPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025);

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Jumlah biaya yang dianggarkan sebesar **Rp. 350.665.136,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Bertambah/ Berkurang
	Belanja Daerah	Rp. 350.103.390	Rp. 350.665.136	Rp. 561.746
	Belanja Operasi	Rp. 350.103.390	Rp. 350.665.136	Rp. 561.746
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 350.103.390	Rp. 350.665.136	Rp. 561.746
I	Belanja Barang	Rp. 84.331.116	Rp. 104.836.281	Rp. 20.505.165
A	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 84.331.116	Rp. 104.836.281	Rp. 20.505.165
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 59.742.086	Rp. 103.014.105	Rp. 43.272.018
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 3.072.924	Rp. 930.735	Rp. -2.142.189
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 600.000	Rp. 0	Rp. -600.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 9.996.105	Rp. 891.441	Rp. -9.104.664



	5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 10.920.000	Rp. 0	Rp. -10.920.000
II		Belanja Jasa	Rp. 265.772.275	Rp. 245.828.855	Rp. -19.943.419
	A	Belanja Jasa Kantor	Rp. 35.772.274	Rp. 15.828.855	Rp. -19.943.419
	1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 14.400.000	Rp. 0	Rp. -14.400.000
	2	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 15.372.274	Rp. 15.828.855	Rp. 456.581
	3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 6.000.000	Rp. 0	Rp. -6.000.000
	B	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000	Rp. 0
	1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000	Rp. 0
TOTAL			Rp. 350.103.390	Rp. 350.665.136	Rp. 561.746

2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

No	Pagu Sub Kegiatan	Realisasi	
		Keuangan	Fisik
1	Rp. 350.665.136	Rp. 335.907.196	95.79 %



3. Hasil yang dicapai

Output Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- a. Tertatanya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- c. Tercapainya kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4. Kendala yang dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi dalam Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah penataan arsip yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan



BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan adanya Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2. Saran

Kami berharap Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar setiap tahun dianggarkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau



Laporan Akhir Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis dan rencana anggaran Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Ria Hastuty, S.E.
Penata (III/c)
NIP197101192014062001

Sri Astuti, S.E., M.A.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP197309222003122003

Mengetahui
PENGUNA ANGGARAN,

Venni Meitaria Detiawati S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP196805281998032004